

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Mukarom Z., Laksana M.W., 2016, *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*, Pustaka Setia, Bandung.
- Mulyana D., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedelapan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, 2015, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan Keempatbelas, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Oktaf, 2011, *Seputar Kartu Tanda Penduduk Elektrik (e-KTP)*. Gunung Agung, Jakarta.
- Ratminto dan Winarsih, 2013, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ivair, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Murai Kencana, Jakarta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

### SUMBER INERNET:

- Hana. 2011. "Hello World". diakses dari <http://www.e-ktp.com/2011/06/hello-world/> pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 21:01 WIB.
- Pemerintah Kabupaten Boyolali. 2017. "Saran". diakses dari [www.boyolali.go.id/saran/10](http://www.boyolali.go.id/saran/10) pada tanggal 21 November 2018 Pukul 22:01 WIB.
- Ujang. 2016. "Masih Ada Warga Belum BerKTP". diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/03/01/o3c66w282-masih-ada-warga-belum-sadar-berktp> pada tanggal 21 November 2018 Pukul 22:11 WIB.

### PUBLIKASI ILMIAH:

Mezak M.H., *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V (3), 2006.

Mulyadi A., Peran Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Pembuatan Ktp Elektronik (E-KTP) di Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, *eJournal Ilmu Pemerintahan* Vol.1(3), 2013.

Ridel, Peran Aparatur Pemerinta Dalam Pelayanan E-KTP, *Jurnal Eksekutif* Vol. 2(1), 2013.

Sugiharto, Fitriah, Idris, Studi Tentang Peran Camat Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan E- KTP Di Kantor Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara, *Jurnal Administrative Reform* Vol. 3(4), 2015.

#### **SUMBER LAIN:**

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

Instruksi Presiden Nomor 1/1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.

Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 1996.

Surat Edaran Direktur Jendral PUOD Nomor 503/125/PUOD Tanggal 16 Januari 1996.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA Tanggal 8 Juli 2002 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90/MENPAN/1989 tentang Delapan Program Strategis Pemicu Pendayagunaan Administrasi Negara.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/1995 tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan Abdistyabhakti bagi unit kerja kerja/kantor pelayanan percontohan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/2004 Tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor No. 63/2004 Tentang Prinsip Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/2004 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 119/2004 Tentang Pemberian Tanda Penghargaan “Citra Pelayanan Prima”.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan